

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan

*Debora Yunike Mongkaren*¹

*Welly Waworundeng*²

*Donald K. Monintja*³

Email Korespondensi: deboramongkaren083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Pencegahan konflik sangat dibutuhkan, dengan berbagai cara atau program yang sudah disusun dan dilaksanakan sehingga dapat memberikan pemahaman lewat informasi yang disampaikan untuk dapat diterima dan dilakukan oleh masyarakat sehingga menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, seperti terjadinya aktivitas yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan jika dilihat dari sisi kerja organisasi sudah cukup baik, masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dan upaya terkait pencegahan konflik sosial sebagai tugas tanggung jawab mereka, karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang bertugas.

Kata Kunci: Kinerja, Kesbangpol, Pencegahan, Konflik

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Sekretaris Daerah, di dalamnya ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai salah satu tugas mencegah terjadinya konflik sosial. Susunan organisasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, yaitu dalam membantu Bupati melaksanakan berbagai tugas kerja mengenai pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pencegahan dan penanganan konflik, fasilitasi hubungan antar kelembagaan dan pengembangan budaya politik sesuai dengan peraturan perundangan serta pengawasan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menjelaskan pembentukan perangkat daerah tersebut sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kepala Daerah, serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Sumber dari Kepala Bidang Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan, pencegahan konflik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangatlah penting, agar tidak lagi muncul konflik-konflik baru yang membuat keamanan dan ketentraman masyarakat sekitar terganggu. Sebagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalamnya ada Bidang Konflik yang memiliki tugas utama dalam deteksi dini yaitu mencari informasi secepat dan setanggap mungkin terkait isu-isu konflik yang akan terjadi serta melakukan Cegah Dini dalam mencegah terjadinya isu-isu konflik baik dengan bantuan Instrumen Kepolisian, serta Pemerintah Desa/Kelurahan setempat. Kedua program tersebut terlihat kurang berjalan dengan optimal karena masih ada saja konflik sosial terjadi yang tidak di deteksi dengan cepat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik contohnya tawuran antar

kelompok yang terjadi di Amurang Bitung dan Ranomea, yang mengakibatkan satu orang meninggal, dan ada juga yang sudah terdeteksi dengan cepat tetapi tidak dicegah dengan sigap contohnya Demo tentang tuntutan sumber perekonomian masyarakat yakni Captikus yang tidak memiliki legalitas sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan perkelahian dari beberapa anggota organisasi dengan oknum polisi, sehingga masih ada saja konflik sosial yang terjadi.

Dalam jurnal penelitian oleh Nurcahyanto (2017) dengan judul "Analisis Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang". Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara umum belum baik terutama pada dimensi produktivitas, yaitu unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pendanaan belum digunakan kemanfaatannya bahkan kurang. Kualitas Layanan, pegawai belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta pelaksanaan tugas yang sering salah, strategi pelayanan belum ada. Responsivitas kurang baik, terkendala jumlah sumber daya manusia yang kurang, tugas pokok dan fungsi yang sangat padat. Akuntabilitas kurang baik, belum adanya alamat web sebagai media transparansi akuntabilitas kepada masyarakat. Faktor sumber daya manusia belum baik sering mengulur-ulur waktu kerja. Budaya organisasi belum baik, profesionalisme masih dinilai dari jabatan bukan hasil kerja, dan kepemimpinan belum baik, pengambilan keputusan dan ide sering dilakukan oleh bawahan.

Penelitian selanjutnya oleh Andriani (2020) dengan judul Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Keamanan Masyarakat di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya tugas yang diselesaikan pada waktu bersamaan, kurangnya wawasan pegawai terhadap pekerjaannya, pimpinan kurang perhatian, pegawai membuat kesalahan dalam pembinaan, dan tidak terlatih. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan keamanan

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

masyarakat di Kota Bontang, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana upaya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan pendekatan teori dari Agus Dwiyanto yang meliputi 4 indikator

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pembahasan

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap individu, sistem, ataupun organisasi untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kata produktivitas itu sendiri memiliki unsur yang sama dengan daya produksi dan keproduktifan. Istilah ini sering digunakan untuk menilai efisiensi suatu organisasi dalam mengubah suatu input menjadi output yang diinginkan. Pengukuran produktivitas organisasi biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk memantau kinerja dan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi di lingkup pemerintahan.

Dengan mengukur produktivitas, ini membantu bagian organisasi mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nantinya, hasil evaluasi prestasi organisasi akan dijadikan acuan atau sebagai tolak ukur untuk melakukan tindakan berikutnya. Mampu melakukan proses evaluasi pekerjaan secara objektif dan jujur akan memotivasi organisasi untuk terus bekerja lebih keras.

Secara umum, istilah produktivitas sering dikaitkan dengan aktivitas produktivitas di dunia kerja. Produktivitas juga biasa digunakan dalam aktivitas sehari-

hari masyarakat. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa pentingnya produktivitas dalam suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja dan berbagai faktor lainnya secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, di dalamnya masyarakat, kepala kelurahan, kepolisian, tokoh adat dan agama yang merupakan unsur penilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial Kabupaten Minahasa Selatan terlihat bahwa ada yang sudah merasa puas dengan kerja mereka, tetapi tidak dapat dipungkiri pula masih ada yang merasa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pendekatan sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat masih kurang tentang tugas dan kerja badan dalam pencegahan konflik sosial, dan yang menjadi pemahaman mereka pencegahan dilakukan oleh pihak yang berwajib dan bukan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menghadapi isu-isu konflik sosial.

Sedangkan hasil penelitian dengan beberapa informan dan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang proses pelaksanaan kinerja pencegahan konflik sosial, diperoleh bahwa pelaksanaan kerja sudah maksimal. Hal tersebut diukur dari outcome dan output, prosedur sebagai outcome dan program kerja yang menjadi outputnya. Memang diakui hambatan dana dalam menunjang kegiatan sosialisasi menjadi faktor penghambat Badan untuk lebih memperluas informasi kepada beberapa masyarakat di berbagai desa/kelurahan. Walaupun demikian, berbagai kerja telah diupayakan, baik dalam melakukan hal antisipasi dini dan cegah dini potensi konflik sehingga di sini terlihat ukuran keberhasilan kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menurunnya kriminalitas di daerah-daerah rawan konflik.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menurut Agus Dwiyanto (2006) menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi

dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat menunjukkan nilai kualitas pelayanan yang dimiliki organisasi, yang dapat dilihat dari penerapan kerja secara efektif yang didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Idealnya, segenap kemampuan organisasi yang dimiliki oleh birokrasi pemerintahan hanya dicurahkan dan dikonsentrasikan sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kemampuan dan kinerja organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat menjadi indikator penting kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, yang merupakan unsur penilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial Kabupaten Minahasa Selatan terlihat bahwa ada perbedaan pandangan dan tanggapan yang diberikan terkait pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada yang merasa puas dengan pelayanan, alasannya karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turun langsung ketika terjadi konflik sosial untuk mencegah agar tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Tetapi ada pula tanggapan informan yang merasa belum puas dengan pelayanan karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mencegah dengan cepat konflik yang terjadi, sehingga sudah terjadi konflik dahulu baru mereka turun lapangan.

Selanjutnya hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang bentuk pelayanan yang diberikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal tindakan pencegahan terhadap isu-isu konflik sosial, didapatkan hasil bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya melakukan sosialisasi, mediasi, edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan preventif dalam melakukan langkah pertama untuk pencegahan konflik sosial. Telah dilakukan penyampaian informasi kepada masyarakat berupa

himbauan edaran perkembangan situasi, terkait hal apa saja yang berpotensi menimbulkan gangguan ditengah masyarakat untuk dapat segera dilaporkan.

3. Responsivitas

Agus Dwiyanto (2006) mengemukakan tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu: Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas tinggi dengan sendirinya memiliki kinerja yang tinggi juga, tetapi jika organisasi memiliki responsivitas yang rendah artinya kinerja yang melakukan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, yang merupakan unsur penilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial Kabupaten Minahasa Selatan terlihat bahwa ada perbedaan pandangan dan tanggapan yang diberikan terkait respon terhadap aduan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Ada yang merasa puas, dengan alasan karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tergolong cepat melakukan upaya pencegahan langsung dengan mempertemukan antara korban maupun pelaku untuk difasilitasi agar terjadi ikatan yang baik kembali. Tetapi ada pula tanggapan informan yang merasa belum puas, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena banyak kejadian konflik yang sudah terjadi, yang lebih dulu merespon dan meredakan

konflik yaitu orang-orang yang berpengaruh di lingkungan.

Berikutnya hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang respon dan langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam melakukan pencegahan konflik sosial ketika ada aduan yang diterima langsung dari masyarakat, maka diperoleh hasil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu siap ketika ada masyarakat yang memberikan aduan, dengan langkah pertama yang dilakukan yaitu turun ke lapangan untuk mengecek keakuratan informasi, dan selanjutnya ditindaki dengan upaya mediasi. Pada intinya pemerintah mengupayakan yang terbaik terkait respon cepat kepada masyarakat, tetapi karena keterbatasan akses dan komunikasi sehingga hal tersebut belum bisa dipenuhi secara menyeluruh.

4. Akuntabilitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006) akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerja organisasi publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kinerja dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat. Akuntabilitas juga berbicara tentang pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi terkait tanggung jawab yang dimiliki. Intinya tugas pokok dan fungsi yang dimiliki organisasi nantinya akan dipertanggungjawabkan apakah sudah maksimal atau masih kurang lewat penilaian laporan kegiatan organisasi yang nantinya akan menunjukkan seberapa besar kerja yang telah mereka lakukan.

Transparansi informasi birokrasi publik dalam melayani masyarakat menjadi hal yang penting dalam organisasi publik mempertanggungjawabkan kinerja yang mereka lakukan dalam setiap upaya pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan

beberapa informan, yang merupakan unsur penilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial Kabupaten Minahasa Selatan terlihat bahwa tetap ada perbedaan pandangan dan tanggapan yang diberikan terkait upaya, penjelasan dan tanggungjawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat tentang pencegahan konflik sosial, sebagian merasa belum optimal karena didasarkan pada pandangan masyarakat yang memiliki tanggapan agar kinerja perlu ditingkatkan dalam hal setiap penjelasan dan upaya terkait pencegahan konflik sosial sebagai tugas tanggung jawab mereka, karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang tugas kerja dalam hal pencegahan konflik sosial. Peneliti juga menemui laporan pertanggungjawaban kegiatan pencegahan konflik sosial tidak disusun dengan alasan karena hanya dikonsumsi pribadi oleh pihak organisasi. Untuk pegangan dokumen dasar aturan juga tidak dimiliki oleh organisasi sehingga masih kurangnya pemahaman yang dimiliki tentang aturan yang mengatur tugas kerja organisasi.

Berikutnya hasil penelitian dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan tentang kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, hasil yang diperoleh yaitu untuk penjelasan sudah sesuai dengan aturan, terlebih dengan kehadiran bidang konflik yang langsung menangani konflik sosial di masyarakat. Belum ada yang melakukan komplain berarti masyarakat memahami dan menaati karena telah dilakukan pendekatan. Pemahaman masyarakat tentang hukum sudah tinggi sehingga kesadaran untuk mendengarkan dan mengikuti anjuran pemerintah terlaksana dengan baik dilapangan.terjadinya abrasi air laut.

Penutup

Kesimpulan

1. Produktivitas

Dalam indikator produktivitas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan jika dilihat dari sisi kerja organisasi sudah cukup baik, tetapi kembali

lagi kepada pandangan masyarakat yang menilai kinerja yang dihasilkan belum maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan konflik sosial, sehingga banyak masyarakat lebih mengharapkan kehadiran pihak berwajib ataupun orang-orang yang berpengaruh untuk dapat meredakan konflik.

2. Kualitas Layanan

Indikator kualitas layanan dalam praktek Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan menghasilkan dua tanggapan berbeda. Sudah cukup baik jika dilihat dari tanggapan organisasi tersebut, namun menurut beberapa informan yang menilai kinerja organisasi tersebut untuk layanan yang diberikan belum maksimal dikarenakan faktor kesiapan dan ketepatan waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cepat, sehingga sudah terjadi konflik dahulu baru organisasi tersebut turun lapangan.

3. Responsivitas

Responsivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan sudah baik hal ini terlihat dari kesiapan organisasi dalam menerima aduan dari masyarakat. Namun karena dibatasi oleh jarak dan lokasi sehingga organisasi melimpahkan tugas pencegahan konflik kepada pemerintah setempat, dan pihak berwajib.

4. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dan upaya terkait pencegahan konflik sosial sebagai tugas tanggung jawab mereka, karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki beberapa informan tentang apa sebenarnya yang menjadi tugas kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal pencegahan konflik sosial, walaupun dalam hasil penelitian ini tanggapan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,

tetapi kembali lagi kepada tanggapan masyarakat sebagai penilai kinerja organisasi publik..

Saran

1. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan terkait pencegahan konflik sosial, langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dan yang paling penting pengenalan organisasi kepada masyarakat, seperti tugas pokok dan fungsi organisasi, agar masyarakat mendapatkan informasi penting tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dapat cepat dan tanggap hadir ketika ada aduan dari masyarakat terkait isu-isu konflik sosial sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan tepat waktu
3. Diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih lagi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut membantu dalam melakukan upaya pencegahan konflik jika dibatasi oleh jarak dan waktu menuju lokasi jika terjadi konflik sosial
4. Untuk setiap program dan laporan kerja khususnya dalam pencegahan konflik sosial untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen tertulis dan yang paling penting yaitu tindakan sebagai bukti tanggung jawab kerja organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, serta lebih memperdalam dasar aturan organisasi sebagai penguat tugas kerja..

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z.H. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press
- Adhyaksa, G. 2015. Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Vol. 2. No 2 adoc.pub_pengelolaan-dana-otonomi-berdasarkan-undang-undang.pdf
- Alfitra. 2017. Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen. Ponorogo: Wade Group

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Ali, F. dan Faried, S. 2015. *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Ashadi. "1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila" Kompas, 31 Mei 2016, Opini, <http://kompas.com>
- Dwiyanto Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gaspersz, V. 2006. *Total Productive Maintenance*. Bogor: Gramedia Pustaka Utama
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nainggolan, E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Ninda, Puspita. 2019. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang. FISIP Universitas Semarang
- Nugrahinni, S. dan Nurcahyanto, H. 2017. *Analisis Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*. Vol. 3. No 6 <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Pananrangi. 2019. *Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru*. Vol. 2. No 1 1906685072A. PANANRANGI JURNAL 2.pdf
- Pruit D. G. dan Rubin J. Z. 2001. *Teori Konflik Sosial Ahli Bahasa Soetjipto HP dan Soejipto SM*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Rosana, E. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)*. Vol. 10. No 2 177546-ID-konflik-pada-kehidupan-masyarakat-telaah.pdf
- Salim dan Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Satel, Sally. "Oxy Contin half-truths can cause suffering." USA Today, October 27, 2003, final edition, Lexis-Nexis, via Galileo,
- <http://www.galileo.usg.edu> Siregar, Sunarto, Shafira M, dan Anwar M. 2020. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandarlampung: Pusaka Media
- Syafiie, K. I. H. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tisya Ayu. 2020. *Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Keamanan Masyarakat di Kota Bontang*. Vol. 4. No 8 0. Jurnal Tisya Ayu Andriani. IP. 1302025285. (1) (08-24-21-11-22-03).pdf
- Utsman, S. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber-sumber Lain

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah